

TAJUK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat kebijakan bantuan kuota umum Internet sebesar 5GB untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bantuan akan diberikan hingga Desember 2020. Banyak siswa di berbagai daerah sudah menerima bantuan itu termasuk siswa di DIY. Bantuan tidak hanya diberikan kepada para siswa, melainkan juga diberikan kepada para guru yang terlibat dalam pembelajaran jarak jauh

alias daring. Tak tanggung-tanggung, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk dana bantuan dari bulan September sampai Desember 2020. Harus diakui, pembelajaran jarak jauh atau dengan sistem daring sudah dilakukan sejak Maret lalu. Para siswa diminta belajar di rumah dalam rangka mencegah penularan Covid-19. Hampir seluruh pembelajaran memanfaatkan teknologi digital baik penyampaian materi ajar maupun tugas-tugas untuk siswa. Para

guru diminta membikin konten baik melalui video atau aplikasi lain yang kemudian para siswa simak melalui perangkat digital mereka. Selain itu, para guru juga menggunakan aplikasi Zoom untuk bisa berinteraksi secara virtual dengan siswa mereka. Namun, model pembelajaran ini bukannya tanpa hambatan dan kekurangan. Banyak sekali hambatan yang ditemui seperti tidak semua siswa atau orang tua mereka memiliki handphone atau laptop

yang bisa digunakan untuk mengikuti aplikasi secara online tersebut. Kalaupun punya, perangkat yang dimiliki tidak support. Persoalan sinyal juga menjadi kendala utama karena tidak semua daerah bisa terpapar dengan jaringan Internet yang bagus. Tak jarang, siswa maupun guru khususnya di daerah pelosok harus keluar rumah untuk mencari jaringan koneksi Internet yang bagus. Tidak ada jaringan Internet, sama saja tidak ada pembelajaran meskipun

para siswa atau guru memiliki perangkat yang bagus, bahkan canggih. Persoalan kuota Internet juga menjadi masalah yang hampir dihadapi mayoritas siswa dan guru. Bahkan, biaya untuk kuota Internet adakalanya jauh besar ketimbang biaya SPP yang harus dibayarkan per bulan. Memang apa yang dilakukan oleh Kemendikbud merupakan jawaban atas persoalan mahalnya biaya kuota Internet meskipun baru diberikan kuota umum 5GB. Kuota seperti itu memang bisa dikatakan belum

memenuhi kebutuhan untuk pembelajaran daring. Harapannya, pemerintah melalui Kemendikbud bisa menambah kuota umum minimal 15GB. Paling tidak dengan kuota seperti itu pelaksanaan daring bisa dilaksanakan secara lancar tanpa harus waswas. Namun, semua itu kembali pada ketersediaan jaringan. Berapa pun besarnya kuota, kalau jaringannya lemah juga tidak akan banyak membantu. Maka dari itu, pemerintah juga harus mendorong adanya pemerataan jaringan Internet.

Halo Jogja

081779991400
Pesan singkat, padat, tak menyinggung masalah SARA, bukan fitnah, tidak bersifat provokatif atau mendiskreditkan pihak atau produk tertentu.
Ketik: #nama 5 salam/isi pesan.
Ber keadilan

Rasioy Jomegatan
08587004xxx
Meskipun banyak angkutan massal yang gulung tikar karena kurang laku bagi warga Jogja, tetapi hal ini tak berlaku bagi angkutan umum berbasis daring. Semoga keberadaan angkutan umum berbasis daring setidaknya bisa mengurangi pemakaian kendaraan pribadi.

Kicauan Hari Ini

YudaPermana@ikiyuda
kabit kedokan slurSmiling face with open mouth and cold sweat
@Harian_Jogja
Tempat Usaha di Kota Jogja Jadi Sasaran Razia Protokol Covid-19

sebutSaja@RyoCosta94
Woaallahh gassss _tegassss
@Harian_Jogja
Corona Terus Melonjak, Persatuan Perawat Minta Pemda DIY Ambil Kebijakan Lebih Tegus

KALASAN BIRU@BM
SerdaduTimur
Yang penting liga 2 jalan
@Harian_Jogja
Sutan & Warga DIY Diimbau Batalan Pelaksanaan Liga 1

sayanglmp@fatmaaaah
2021 kudu dadiRaised fist
@Harian_Jogja
Bakal Dilintasi Exit Toll, Ini Rencana Pembangunan Wisata di Sleman

AriArius@ariuserley
Stop liga di masa pademi.
@Harian_Jogja
Sutan & Warga DIY Diimbau Batalan Pelaksanaan Liga 1

TheNorthFans@ELmarcovan
maen di bekas aja
@Harian_Jogja
Sutan & Warga DIY Diimbau Batalan Pelaksanaan Liga 1

duan@patheticbae
wagu
@Harian_Jogja
Sutan & Warga DIY Diimbau Batalan Pelaksanaan Liga 1

POJOK
Reses Dewan perlu patuhi protokol kesehatan
Biar jadi contoh rakyat

Kampanye paslon kurang lirik konsep daring
Gregetnya kurang...

Literasi Digital untuk Pengembangan UMKM



Ralina Transistari
Dosen Tetap STIM YKPN Yogyakarta

Dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini sangat dirasakan oleh seluruh sektor ekonomi, tidak terkecuali sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM yang di jaman resesi beberapa tahun lalu mampu berkembang dan menjadi penopang utama perekonomian negara, akibat pandemi ini menjadi sektor yang mengalami dampak berat. Sektor usaha yang paling terdampak menurut survei Kementerian Koperasi dan UMKM pada bulan Juni 2020 adalah sektor penyedia akomodasi dan makan minum (35,88%), pedagang besar dan eceran (23,33%), dan industri pengolahan (17,83%).
Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 64 juta unit usaha yang tergolong UMKM di Indonesia atau sekitar 99 persen populasi usaha dan mampu memberikan lapangan kerja

baru dan peningkatan volume permintaan 5-10 kali selama pandemi dengan penjualan di e-commerce mencapai Rp36 triliun atau naik sebesar 26%. Hal ini menunjukkan tak semua sektor usaha mengalami penurunan, namun lebih banyak disebabkan karena UMKM belum memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar digital. Hasil survei pada bulan Januari 2020 di Indonesia terdapat 338 juta pengguna telepon seluler (124% populasi), 175,4 juta pengguna internet, dan 160 juta pengguna media sosial secara aktif. Ini adalah peluang pasar yang dapat dijangkau jika UMKM go digital.

Surutkan Upaya
Pengembangan UMKM digital menjadi tantangan karena menghadapi beberapa permasalahan antara lain adalah terbatasnya pemahaman terhadap teknologi/digital/pemasaran online,

melakukan berbagai upaya melalui kolaborasi dan sinergi, baik antar Kementerian/Lembaga swasta, startup, dan juga Perguruan Tinggi. Adapun kegiatannya meliputi memperluas akses infrastruktur digital, akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan, juga sistem informasi digital UMKM. Dengan kegiatan tersebut Kementerian Koperasi dan UMKM menargetkan 10 juta UMKM dapat terdigitalisasi hingga akhir 2020. Digitalisasi UMKM ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk bangkit dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

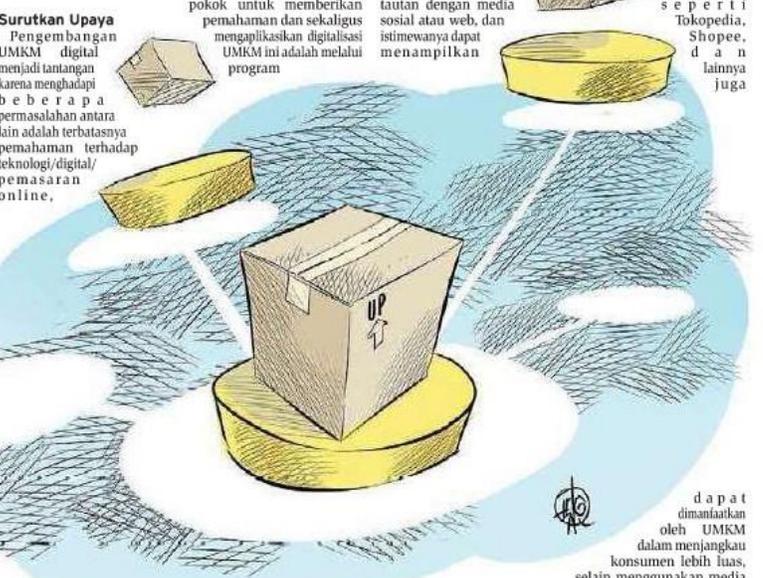
Salah satu kegiatan yang pokok untuk memberikan pemahaman dan sekaligus mengaplikasikan digitalisasi UMKM ini adalah melalui program

media sosial yang sudah banyak digunakan untuk "berjualan", salah satunya adalah Google Bisnis yang memungkinkan pelaku usaha mempromosikan profil bisnis dan situs bisnisnya di Google Maps. Dengan akun Google Bisnis ini UMKM dapat melihat dan menjangkau konsumen, memposting pembantuan ke profil bisnis, dan melihat cara pelanggan berinteraksi dengan bisnis tersebut.

Aplikasi lainnya yang perlu diedukasi adalah Whatsapp Business yang menyediakan berbagai fitur gratis seperti profil bisnis, tautan dengan media sosial atau web, dan istemewanya dapat menampilkan

rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan juga memperlebar bisnisnya.

Hal ini menjadikan edukasi literasi di bidang keuangan digital diperlukan. Menurut survei yang dilakukan Keuangan Inklusi) 70% orang dewasa di Indonesia sudah memiliki telepon pintar, 45% berupa telepon pintar, namun kurang dari 25% dari yang bertepatan untuk bertransaksi keuangan secara digital. Memasuki berbagai marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya juga



dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam menjangkau konsumen lebih luas, selain menggunakan media sosial yang standar seperti Facebook dan Instagram. Berbagai aplikasi e-wallet dapat juga diperkenalkan untuk memperlebar transaksi.

Harian Jogja/Hengki Mawan

terbatasnya ketersediaan akses Internet, keamanan transaksi yang menjadi pertimbangan utama konsumen, juga akses pasar yang rendah. Namun tantangan tersebut tak harus menyurutkan upaya untuk digitalisasi UMKM karena literasi digital menjadi keterampilan yang mutlak harus dimiliki oleh UMKM pada masa sekarang ini untuk dapat menjangkau konsumen. Selain itu digitalisasi UMKM juga memberikan manfaat pada kemudahan transaksi, memahami kebutuhan konsumen lebih cepat, memperluas pasar, operasional usaha yang fleksibel, dan akses jaringan usaha yang luas.

Untuk mendorong digitalisasi UMKM, pemerintah telah

pelatihan. Pelatihan perguruan tinggi dalam hal ini menjadi sangat tepat dikaitkan dengan kewajiban Perguruan Tinggi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai salah satu program merdeka belajar bagi mahasiswa, dan menjadi cikal bakal munculnya pengusaha-pengusaha baru yang melek digital.

Jangkau Konsumen
Peningkatan kemampuan digital melalui pelatihan bagi UMKM saat ini menjadi lebih praktis karena hadirnya berbagai platform digital yang dapat digunakan secara gratis bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya secara digital. Selain dengan

produk/jasa yang ditawarkan dalam sebuah katalog yang sangat mudah dibagikan, selain itu juga fitur jawaban singkat yang otomatis sehingga efektif waktu, dan kode QR. Baru-baru ini Whatsapp Business bekerjasama dengan @ukmIndonesia dalam program pelatihan UKM go Digital secara virtual di berbagai kota.

Selain aplikasi-aplikasi yang mendorong pemasaran produk, digitalisasi bisnis dalam hal keuangan juga sangat perlu untuk dapat diedukasi. Seperti kita ketahui, adanya pandemi ini menjadikan konsumen menghindari penggunaan uang tunai dalam berbelanja, bahkan dengan kartu sekalipun. Kecenderungan cara transaksi yang berubah ini menuntut UMKM untuk dapat menggunakan sistem pembayaran non tunai atau digital payment dalam